

- SUFFRAGE

- MILITARY POLICY

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tat 05/05

Feb  
h.

## SKRIPSI

### HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) PASCA PERUBAHAN UUD 1945



OLEH :

**ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH**

**NIM. 030015082**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(TNI) PASCA PERUBAHAN UUD 1945**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Pembimbing,**



**SUKARDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 131855885**

**Penyusun,**



**ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH**  
**NIM. 030015082**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari semua penjelasan dan pembahasan pada skripsi ini tentang HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TNI PASCA PERUBAHAN UUD 1945, bisa diambil kesimpulan tentangnya.

Pengaturan Hak Politik di Indonesia telah berkembang sejak lama. Sejak awal kemerdekaan telah ada pengaturan dan perlindungan Hak Politik bagi warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut terus berkembang sejalan dengan berubahnya jaman. Ideologi dan penguasa turut mempengaruhi perkembangan dan perubahan terhadap pengaturan hak-hak politik. UUD 1945 pasca amandemen telah berusaha menyempurnakan perlindungan terhadap Hak Politik warga negara. Peraturan perundang-undangan di bawahnya pun berusaha untuk memayungi semua hak politik warga negara. Yang jelas, Indonesia sebagai negara hukum yang dituntut untuk melindungi hak-hak warga negaranya, telah melakukan dan membuat pelbagai peraturan-peraturan yang dirasa mampu untuk memberikan perlindungan terhadap warganya.

Sementara itu dalam perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak pilih bagi warga negara pun juga turut berkembang. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu kurun waktu 1945 sampai 1949, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang hak pilih. Mengingat pada masa periode ini Indonesia merupakan suatu negara yang baru

lahir, sehingga belum ada yang namanya Pemilihan Umum. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga demikian, pengaturan tentang perlindungan terhadap hak pilih warga negara juga belum ada. Baru kemudian pada masa UUDS 1950 dimana pada masa itu diadakannya Pemilihan Umum untuk pertama kali, baru terdapat perundang-undangan yang mengatur tentang hak pilih. Yaitu UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada UU tersebut semua warga negara yang telah berusia 18 tahun keatas atau sudah menikah mempunyai hak pilih. Pada masa berlakunya dua konstitusi sebelumnya pengaturan hak pilih dalam tingkatan undang-undang belum ada.

TNI merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Ciri utama warga negara adalah ia merupakan suatu status yang diberikan oleh negara yang mempunyai hubungan timbal-balik dengan negara. Hubungan timbal balik ini berupa hak dan kewajiban bagi warga negara. TNI juga demikian, ia pada awalnya merupakan warga negara biasa, tetapi kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban istimewa terhadap negaranya. Tetapi pada dasarnya anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, anggota TNI juga semestinya mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara biasa lainnya termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Anggota TNI sebagai warga negara pada dasarnya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia samapi saat skripsi ini ditulis, menyatakan bahwa TNI tidak diperkenankan untuk menggunakan hak memilih maupun dipilihnya. Apabila kita lihat dari sudut

demokrasi maka sepiantas lalu tampak adanya pengekanan hak terhadap anggota TNI sebagai warga negara. Dan ini seolah-olah bertentangan dengan salah satu wujud dari demokrasi itu sendiri, yakni persamaan dan kebebasan. Tetapi yang perlu untuk diingat dan dipahami, pengaturan tentang pembatasan dalam demokrasi itu diperkenankan. Karena pembatasan-pembatasan tersebut lebih berupa upaya kontrol agar kehidupan masyarakat menjadi teratur seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi sendiri, atau dengan kata lain pembatasan bisa juga untuk mencegah terjadinya anarkisme.

Apabila kita lihat kembali lewat jendela sejarah, terjadi pengaburan makna demokrasi dan supremasi sipil. Yaitu dengan diberlakukannya konsep Dwifungsi TNI. Konsep dwifungsi TNI ini sebagaimana diketahui adalah TNI selain sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara, ia juga berfungsi secara fungsional atau kekaryaan. Artinya TNI juga dapat ikut serta dalam percaturan politik. Ini berarti mengaburkan profesionalisme TNI. Dimana profesionalisme TNI sendiri dapat terlaksana apabila adanya suatu kontrol oleh masyarakat sipil secara obyektif. Lalu, terkait dengan konsep dwifungsi sendiri tentunya sulit terciptanya kontrol sipil secara obyektif apabila militer (TNI) memasuki ranah sipil. Oleh karena itu TNI pada masa lalu menjadi kurang profesional. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jabatan yang seharusnya dipegang oleh sipil justru dipegang oleh militer, dan ini tidak melalui mekanisme demokrasi sebagaimana biasanya. Jadi, konsep dwifungsi TNI tidak akan menjadi udara yang segar yang perlu dihirup dalam kehidupan demokrasi.

## 2. Saran

Untuk penegakan demokrasi perlu untuk segera diberikan Hak Politik terutama hak pilih bagi anggota TNI sebagai warga negara. Karena pelaksanaan hak sipil dan politik harus secara komprehensif tanpa membedakan. Mengingat pelaksanaan hak-hak tersebut mencerminkan pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara.

Pemberian hak memilih tersebut segera dituangkan dalam suatu produk undang-undang, sehingga hak anggota TNI tersebut lebih terjamin dalam hal pelaksanaannya.

Pada perundang-undangan yang akan datang sebaiknya hak politik yang diberikan hanya sebatas pada hak untuk memilih. Sedangkan hak untuk dipilih sebaiknya tidak usah diberikan. Karena hal ini untuk menjaga netralitas anggota TNI dalam hal kebijakan negara. Hak untuk dipilih dapat saja diberikan selama anggota TNI tersebut mau untuk melepaskan seragam militernya.

Pelaksanaan hak politik terutama hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara Indonesia ke depan, hendaknya terus diperbaharui dan disempurnakan sehingga nantinya cita-cita luhur bangsa Indonesia akan dapat tercapai.